

Problematika Perguruan Tinggi Islam Swasta (PTAIS)

Mardeli¹, Dwi Noviani², Choiriyah³, Kris Setyaningsih⁴

^{1,4}Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, South Sumatra, Indonesia

²Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah, Indralaya, South Sumatra, Indonesia

³Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang, South Sumatra, Indonesia

email: mardeli_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to describe the facilities and infrastructure of private universities in Indonesia which are equivalent to universities run by the government. The role of private educational institutions is the same as that of the state, namely taking part in educating the nation's children. The research method uses a qualitative approach, based on research results oriented towards developing academic quality on an international scale so that academic and social needs on a national and regional scale are automatically met; 2) supported by a good academic atmosphere so that efforts to improve academic quality can run more quickly and effectively; 3) become the main supporter of the internationalization of Islamic education that is more humane and builds a broad international academic network to support superior, innovative and productive domestic human resources.

Keywords: *Islam; College; Problems, Private.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sarana dan prasarana perguruan tinggi swasta di Indonesia yang setara dengan perguruan tinggi yang dijalankan oleh pemerintah. Peran lembaga pendidikan swasta sama halnya dengan negara, yaitu ikut andil dalam mencerdaskan anak bangsa. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan hasil penelitian yang berorientasi pada pengembangan kualitas akademik dalam skala internasional sehingga kebutuhan akademik dan sosial untuk skala nasional dan regional dengan sendirinya terpenuhi; 2) didukung dengan suasana akademik yang baik sehingga upaya peningkatan mutu akademik dapat berjalan lebih cepat dan efektif; 3) menjadi penopang utama internasionalisasi pendidikan Islam yang lebih manusiawi dan membangun jaringan akademik internasional yang luas untuk mendukung sumber daya manusia dalam negeri yang unggul, inovatif dan produktif.

Kata Kunci: *Islam; Perguruan Tinggi; Problematika, Swasta.*

A. PENDAHULUAN

Era globalisasi merupakan era persaingan kualitas atau kualitas. Maka pendidikan tinggi di era globalisasi harus berbasis mutu. Dalam memberikan layanan pendidikan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, diperlukan upaya untuk menciptakan, membangun, dan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, salah satunya ditentukan oleh pendidikan. (Atmanti, 2005; Hakim, 2018).

Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang ditempuh pada tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Sebagaimana tertuang dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 3. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang utuh. manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (DPR RI, 2003; Megasari, 2014; Nurbaiti, 2015; Rosivia, 2004).

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan merupakan lembaga yang berperan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang tinggi (Primayana, 2017; Kurniawan, 2012). Perguruan tinggi dituntut untuk mampu memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya pendidikan yang mempunyai peranan penting karena dapat meningkatkan penataan sarana dan prasarana pendidikan sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap jalannya proses pendidikan (Sudarsana, 2017).

Perguruan tinggi sebagai bentuk organisasi diartikan sebagai wadah kumpulan insan terdidik yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu tujuan pendidikan. Keberhasilan program pendidikan dalam proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu peserta didik, kurikulum, tenaga kependidikan, dana, sarana dan prasarana, serta faktor lingkungan lainnya. Jika faktor-faktor tersebut terpenuhi dengan baik dan berkualitas maka akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia (Iskandar, 2017; Ulfah Iran, Murniati, & Khairuddin, 2014; Yudi, 2012).

Ada gap image yang terlalu jauh antara PTAIN dan PTAIS. Kondisi ini membuat masyarakat lebih mempercayai PTAIN dibandingkan PTAIS. Hal ini merupakan stereotype keberpihakan masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri, meskipun dalam beberapa hal memiliki kualitas yang sama dengan perguruan tinggi negeri bahkan mungkin melebihinya.

Biaya kuliah terkadang tidak jauh berbeda. Dampak dari pencitraan tersebut adalah deretan output di perguruan tinggi swasta menjadi tidak baik. Hal ini membuat perguruan tinggi swasta bekerja lebih keras untuk menarik calon mahasiswa yang berkualitas untuk masuk ke perguruan tinggi swasta. Dalam konteks pendidikan Islam pun demikian. PTAIS harus lebih semangat lagi dalam menjaring calon mahasiswa yang berkualitas. Namun, mengembalikan masa keemasan Islam di Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab PTAIN tetapi menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat (Mas'ud, 2001).

Secara umum, PTAI masih kalah bersaing dalam memproduksi output siap pakai. Setiap tahunnya, lulusan PTAI tidak terserap ke dalam dunia kerja, baik di sektor publik maupun non publik (Rivan, 2005). Kondisi ini dijelaskan oleh Mark Haynes Daniel (2002). sebagai menakutkan tapi benar, menakutkan tapi benar. Setelah beberapa IAIN berubah menjadi UIN. Bagi UIN, tidak ada pemisahan/keberpihakan teologis antara iptek dan ilmu agama. Kedua ilmu itu sama. Oleh karena itu, mereka harus diperlakukan sama, yaitu harus dipelajari. Masyarakat abad ke-21 cenderung mengarah pada pembentukan masyarakat pengetahuan tanpa kehilangan nilai-nilai agama.

Dalam konteks PTAIS, laporan di atas dijadikan motivasi untuk segera memperbaiki kondisi PTAIS, khususnya yang berstatus swasta. Namun, pada abad ke-21 ini, keberadaan sebuah universitas tergantung pada kesiapan lulusan dan institusinya untuk bersaing dalam masyarakat yang penuh persaingan dan kesadaran global. Oleh karena itu, pembenahan pendidikan tinggi Islam khususnya PTAIS merupakan tuntutan mutlak untuk melakukan perubahan yang berkualitas dan tetap eksis sebagai lembaga pendidikan yang disegani baik saat ini maupun khususnya di masa yang akan datang.

Menurut Kennedy perubahan merupakan suatu hal yang perlu, maka dalam melaksanakan reformasi pendidikan harus berpegang pada tantangan masa depan yang penuh dengan persaingan global untuk dapat bersaing dengan baik, bukan bernostalgia (Suyanto, 2001).

Sebagaimana diketahui bahwa tugas pemerintah dalam pendidikan agama Islam adalah memberikan pelayanan yang bermutu di bidang ilmu agama yang terjangkau. Peran ini biasanya dilakukan oleh PTAIN dan tentunya dibantu oleh lembaga pendidikan masyarakat yaitu PTAIS untuk membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain memberikan layanan pendidikan tinggi, tugas pemerintah lain yang tidak kalah pentingnya adalah melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian akibat “malpraktik” di bidang pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pengawasan merupakan bagian yang mendesak dan tidak terpisahkan dari upaya

melindungi kepentingan masyarakat dan meminimalisir malpraktek di bidang pendidikan (Furchan, 2004).

Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui Kopertais yang secara tidak langsung diperankan oleh (IAIN/STAIN), sedangkan UIN/IAIN/STAIN sendiri tidak pernah diawasi. Keadaan ini menyiratkan bahwa keberadaan PTAIS “seolah-olah” kualitasnya di bawah IAIN/UIN/STAIN sebagai Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Namun seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, keberadaan PTAIS terkadang malah lebih mumpuni dari PTAIN itu sendiri. Dengan demikian beberapa PTAIS memiliki mutu atau mutu yang melebihi PTAIN, hal ini dapat menjadi sinyal positif, untuk itu perlu diketahui sejauh mana kriteria suatu PTAIS dapat dikategorikan memiliki standar mutu menurut versi masyarakat atau sesuai keinginan masyarakat. pemerintah. Kajian ini mengkaji tentang penerapan manajemen mutu di Perguruan Tinggi Islam swasta agar kualitas lembaga terjamin dan lulusannya dapat bersaing dengan PTAIN.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan. Mengenai sumber data, peneliti menggunakan dua jenis data, sumber data primer, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis isi dengan proses lebih lanjut dengan mengkategorikan dan menyeleksi secara mendalam. Dalam pengujian keabsahan data, peneliti mengusulkan dua model yaitu triangulasi sumber.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam UU Sisdiknas (UU No 20/2003) pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki jiwa keagamaan-spiritual. kekuatan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Pasal (19) menyatakan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang meliputi program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktoral yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa perguruan tinggi mempunyai otonomi untuk mengelola lembaganya sebagai pusat pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Mengenai pendanaan, ayat (3)

menyatakan bahwa perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi, seperti pendidikan dasar dan menengah, menurut undang-undang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Artinya, masyarakat berhak mendirikan dan mengelola perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peluang ini dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sehingga perguruan tinggi swasta didirikan di mana-mana. Seiring dengan kebebasan perguruan tinggi negeri untuk membuka berbagai jurusan dan program studi, keberadaan perguruan tinggi swasta semakin terancam. Semakin sedikit universitas yang membuka program studi dan fakultas baru. Akibatnya, banyak perguruan tinggi swasta yang gulung tikar karena tidak mampu bersaing memperebutkan mahasiswa.

Sifat hukum di atas mengandung arti bahwa beberapa aspek penting harus diperhatikan dalam pendidikan, yaitu; kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan kata lain, program pendidikan tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan tetapi juga menekankan pada pengembangan sikap dan pengembangan keterampilan peserta didik. Oleh karena itu, perguruan tinggi seharusnya menjadi lembaga yang tidak hanya didominasi oleh pendidikan dan penelitian tetapi juga harus menjadi lembaga yang dapat menumbuhkan sikap terpuji terhadap civitas akademiknya, yaitu sikap menghindari tindakan kekerasan seperti pemukulan atau penganiayaan dan tindakan kekerasan. ketidakjujuran akademik seperti kasus plagiarisme, lelucon, dan kecurangan.

Pendidikan tinggi terdiri dari dua jalur, yaitu jalur akademik dan jalur vokasional. Jalur akademik adalah universitas, institut, dan sekolah menengah atas yang menawarkan gelar akademik dan spesialis bertingkat dan mencakup program pendidikan sarjana, pascasarjana, spesialis, dan doktoral. Sedangkan jalur vokasi, umumnya menawarkan pendidikan vokasi setingkat program diploma. Pendidikan ini umumnya diselenggarakan oleh semua akademi di Indonesia. Perguruan Tinggi Islam Agana adalah lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang bertujuan untuk menghasilkan ahli-ahli Islam yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya Islam untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan mencerdaskan budaya bangsa (Furchan, dkk. ...a 2005).

Upaya pembelajaran di PTAIS sendiri sudah berlangsung sejak dibukanya Sekolah Tinggi Agama Islam (STI) di Jakarta pada Juli 1945 sebelum Indonesia merdeka. Sejak saat itu, terjadi dinamika perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia yang diawali dengan

lahirnya STI yang kemudian berubah menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta (Daulay, 2004: 133).

Perubahan dari STI menjadi UII terjadi pada tahun 1948, saat itu UII memiliki lima fakultas. Kemudian salah satu fakultas di UII yaitu Fakultas Agama diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Agama yang kemudian dijadikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dengan PP No 34 Tahun 1950 dan ditandatangani oleh Presiden I pada tanggal 14 Agustus 1950. Menurut pasal 2 PP No. 34 Tahun 1950 dijelaskan bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam bertujuan menyelenggarakan pendidikan tinggi dan menjadi pusat penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang agama Islam (Yunus, 1979) .

Daya saing SDM Indonesia sangat lemah jika dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara Asia lainnya. Indonesia bahkan berada di bawah Thailand dan Vietnam yang dalam beberapa dekade terakhir banyak belajar dari Indonesia dalam hal pendidikan. Malaysia bahkan mampu tampil memosisikan diri di atas Hong Kong dan Filipina. Fakta ini semakin mempertegas betapa rendahnya kualitas sistem pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, PTAIS melalui PTAIS sudah saatnya melakukan pembenahan yang serius jika ingin memberikan kontribusi yang signifikan bagi negeri ini, sekaligus mengukuhkan eksistensinya sebagai salah satu alternatif perguruan tinggi nasional terbaik di Indonesia yang juga mampu bersaing. di berbagai tingkat kompetisi, baik nasional maupun internasional., regional dan internasional.

Perguruan tinggi merupakan wahana bagi para ahli yang diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan berkontribusi dalam pembangunan. Sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan empat kebijakan utama di bidang pendidikan, yaitu pemerataan dan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, mutu pendidikan, dan efisiensi pendidikan. . Khusus untuk perguruan tinggi akan diprioritaskan untuk membahas relevansi pendidikan dengan pembangunan yang dalam langkah implementasinya dikenal dengan linkage and equivalence (Fadjar, 2005). Hanya dengan pengetahuan yang mendalam tentang apa yang dibutuhkan pembangunan, pendidikan akan dapat mencapai hasil yang lebih sesuai dengan misi dan fungsinya. Upaya menciptakan keterkaitan dan kesetaraan mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan pendidikan (proses belajar mengajar), penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam Dharma Pendidikan perlu dilakukan evaluasi relevansi program dan jurusan yang ada dengan kebutuhan pembangunan, dalam artian apakah SDM yang dihasilkan dapat diserap oleh kegiatan ekonomi dan pembangunan.

Pertama, kenali raw input dan instrumental input. Raw input adalah mahasiswa sedangkan instrumental-input terdiri dari: gedung, perpustakaan, pedoman akademik, dosen, kurikulum, dan metode; kedua, raw-input dan instrumental-input dimasukkan dalam proses, yang akan memakan waktu delapan (8) semester; ketiga, output (mahasiswa luaran) yang sesuai dengan kriteria kelembagaan dan siap memasuki persaingan global. Dosen merupakan instrumen yang menentukan keberhasilan proses pendidikan karena dari dosenlah dilakukan transfer ilmu kepada mahasiswa (Azra, 2002).

Perguruan tinggi yang memiliki dosen yang berkualitas akan banyak diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu, program peningkatan kualitas dosen merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar lagi sekarang dan di masa mendatang. Perguruan tinggi yang tidak mau mengikuti perkembangan zaman dan masa depan akan ditinggalkan oleh masyarakat dan cepat atau lambat akan mengalami kemunduran yang pada akhirnya akan runtuh. Sedangkan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi serta bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.

Kurikulum dibagi menjadi kurikulum inti dan kurikulum lokal. Kurikulum inti merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional pada setiap program studi, yang memuat tujuan pendidikan, kandungan ilmu, dan kemampuan minimal yang harus dicapai mahasiswa dalam menyelesaikan suatu program studi. Sedangkan kurikulum lokal merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang memperhatikan kondisi dan kebutuhan lingkungan serta karakteristik perguruan tinggi yang bersangkutan (Sufyarma, 2004).

Pengembangan Mutu PTAIS di Indonesia

Mutu merupakan bagian dari penjabaran strategi pengembangan PTAIS yang utamanya meningkatkan manajemen mutu sistem pendidikan tinggi Islam di PTAIS. Sallis (2001) menegaskan bahwa manajemen mutu pendidikan akan sangat membantu lembaga pendidikan, setidaknya untuk tiga hal penting; Pertama, manajemen mutu akan memperkuat sistem manajemen pendidikan tinggi menjadi lebih baik. Sehingga dengan diterapkannya manajemen mutu maka kualitas PTAIS akan menjadi lebih baik. Kedua, dengan manajemen mutu, PTAIS akan mampu menghasilkan produk pendidikan tinggi Islam swasta yang unggul dan berdaya saing. Ketiga, dengan manajemen mutu, PTAIS di Indonesia akan lebih mapan dalam menjalani persaingan dengan perguruan tinggi lain, baik swasta maupun negeri, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional.

Mutu dalam konteks PTAIS juga mendorong otonomi perguruan tinggi swasta. Otonomi penyelenggaraan perguruan tinggi swasta pada awalnya terkait dengan kebijakan pemerintah/negara tentang jaminan kemandirian perguruan tinggi. Hubungan ini harus didasarkan pada prinsip kebebasan akademik dan kemandirian kelembagaan. Kemandirian ini diperlukan untuk mendorong kreativitas dan kebebasan mengatur diri sendiri. Posisi pemerintah pusat hanya menjadikan dirinya sebagai fasilitator melalui beberapa kebijakan makro agar perguruan tinggi swasta lebih mandiri, termasuk PTAIS.

Pelaksanaan otonomi pendidikan tinggi memiliki konsekuensi besar, terutama pada pembiayaan. Agar otonomi perguruan tinggi bermakna bagi kemajuan bangsa dan masyarakat, maka kebijakan tersebut harus terkait erat dengan penjaminan mutu proses belajar mengajar dan produknya, serta meningkatkan akuntabilitas perguruan tinggi swasta tersebut kepada pemangku kepentingan. Untuk itu, evaluasi berkelanjutan harus dilakukan baik secara internal maupun oleh lembaga akreditasi independen. Untuk mewujudkan target di atas, diperlukan kerja sama melalui pembentukan lebih banyak asosiasi perguruan tinggi swasta dan jejaring lainnya. Jaringan antar perguruan tinggi swasta di bawah koordinasi suatu asosiasi akan sangat membantu dalam mengatasi kekurangan perguruan tinggi baik dalam hal pengadaan software, hardware, maupun brainware.

Otonomi perguruan tinggi juga terkait dengan kewenangan kelembagaan dalam menentukan tujuan dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk kewenangan kelembagaan untuk menggunakan cara-cara tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Bidang yang paling penting dari otonomi pendidikan tinggi adalah kebebasan akademik. Adalah kebebasan dosen dan ilmuwan secara pribadi untuk mencari dan mencapai kebenaran melalui pengajaran dan penelitian tanpa takut hukuman atau tindakan administratif. Jika manajemen penjaminan mutu dilakukan dengan baik, maka otonomi yang lebih besar bagi perguruan tinggi swasta, khususnya PTAIS, akan lebih bermakna.

Keberadaan lembaga penjaminan mutu di PTAIS tidak hanya menjadi papan nama/formalitas tetapi berfungsi sesuai tugas dan perannya. Lembaga penjaminan mutu yang aktif akan berusaha mewujudkan tanggung jawab yang lebih besar, penjaminan mutu yang lebih besar, dan akuntabilitas yang lebih besar bagi lembaganya, tidak cenderung mencari-cari kesalahan orang lain di dalam lembaga tersebut. Otonomi yang lebih besar lagi, apabila dilaksanakan secara efektif dan efisien, akan berdampak pada pengembangan program studi dan kurikulum yang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Tanggung jawab yang lebih besar berarti PTAIS harus bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan dan pelanggan (mewakili seluruh masyarakat) tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penjaminan

mutu yang lebih besar berarti bahwa PTAIS harus dapat memberikan jaminan yang lebih nyata atas mutu proses, produk, dan layanan melalui evaluasi internal dan eksternal oleh badan independen asing dan domestik (seperti BAN-PT).

Evaluasi bahkan dapat dilakukan sendiri oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta melalui sertifikasi internal. Akuntabilitas yang lebih besar terutama berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, kualitas lulusan, penggunaan dana, dan hasil penelitian melalui pengelolaan yang akuntabel. Akuntabilitas merupakan bentuk rasa tanggung jawab, tanggung jawab, dan tanggung jawab seseorang atau suatu lembaga. Pertanggungjawaban perguruan tinggi Islam swasta tidak hanya kepada pemerintah tetapi juga kepada masyarakat terutama kepada mahasiswa dan orang tua sebagai pelanggan utamanya. Selain itu, PTAIS juga harus bertanggung jawab kepada pengguna lulusan, asosiasi, dunia profesional, serta asosiasi dan ilmunya di seluruh dunia. PTAIS juga bisnis jasa. Jasa adalah pelayanan berupa hasil karya atau prestasi yang diberikan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan layanan pendidikan memiliki ciri khusus yaitu; (a) dapat diukur misalnya layanan administratifnya; (b) tidak dapat diukur (misalnya mutu pendidikan, di sini ada bagian siswa); dan (c) capaian yang diberikan lembaga pendidikan sebenarnya berupa 'usaha' atau 'proses' bukan hasil.

Dengan demikian, pengelola PTAI swasta harus menyadari bahwa setiap saat harus selalu membuktikan bahwa telah melakukan manajemen yang baik, dilakukan dengan baik berdasarkan peraturan yang ada. Di sini akuntabilitas adalah tanggung jawab sekaligus pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya dalam memberikan pelayanan kepada publik. Ketika sebuah perguruan tinggi agama Islam swasta telah beroperasi, ia telah melakukan transaksi dengan konsumen dalam hal ini mahasiswa dan orang tua serta masyarakat pada umumnya. Bentuk transaksi ini dapat ditemukan dalam tiga tahap; 1) transaksi tahap awal yaitu berupa iklan, brosur, seleksi penerimaan; 2) transaksi pada tahapan utama berupa proses administrasi dan belajar mengajar; 3) transaksi pada tahap produk yaitu berupa lulusan.

Menurut UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), setiap penyelenggara perguruan tinggi harus mengetahui kinerjanya. Karena pada gilirannya, jika masyarakat konsumen/pengguna layanan pendidikan tinggi menyadari haknya, maka akan banyak tuntutan dan tuntutan terhadap perguruan tinggi yang melakukan "malpraktek". Akuntabilitas kepada pemerintah berkaitan dengan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pendidikan di suatu perguruan tinggi dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. PTAIS juga mensyaratkan akuntabilitas dalam hal penggunaan dana dan laporan tahunan yang diaudit oleh

akuntan publik. adalah suatu keharusan untuk memastikan kepercayaan publik yang tinggi. Pertanggungjawaban PTAIS kepada dunia profesional bertujuan untuk melanggengkan pemahaman, keterampilan, dan keterampilan bidang keilmuan. Secara filosofis PTAIS juga harus bertanggung jawab secara moral dan spiritual atas segala aktivitasnya dengan menunjukkan integritasnya dan memastikan dirinya dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia pada umumnya.

Mewujudkan pendidikan tinggi Islam yang berkualitas internasional, dalam konteks internasionalisasi pendidikan di era globalisasi saat ini, PTAIS di Indonesia harus memiliki strategi pengembangan pendidikan tinggi. Hal ini dimaksudkan agar PTAIS di Indonesia dapat berkembang dan maju sesuai kebutuhan global tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional. Pandangan futuristik tersebut merupakan hal yang wajar mengingat internasionalisasi pendidikan tinggi di era globalisasi atau liberalisasi yang dimediasi melalui pasar bebas yang sangat mungkin tidak hanya memberikan harapan untuk kelangsungan hidup lebih lanjut tetapi juga ancaman untuk semakin menghancurkan roda pendidikan tinggi di Indonesia. suatu negara, khususnya infrastruktur PTAIS di Indonesia. Indonesia masih jauh dari harapan. Jika hal ini tidak diantisipasi maka bukan kemajuan yang didapat, melainkan takdir yang mengharuskannya untuk “keluar dari usaha”. Kesiapan mental internal PTAIS dan dukungan antisipatif kebijakan pendidikan nasional dalam merancang kebijakan di sektor menjadi faktor penentu keberlangsungan sebuah PTAIS.

Robertson mengatakan bahwa internasionalisasi dalam pendidikan merupakan upaya mempersiapkan suatu negara agar dapat mencapai kejayaan peradaban. Namun internasionalisasi pendidikan jika tidak dikelola dengan baik dapat menjerumuskan negara ke dalam lembah kehancuran (Ward, 2000: 14). Dalam konteks itu, upaya strategis peningkatan mutu di PTAIS, yakni dengan meningkatkan manajemen mutu Sistem Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta, akan dilakukan secara serentak dan berkesinambungan. Pengelolaan penjaminan mutu pendidikan tinggi harus berorientasi pada pengembangan kualitas akademik internasional (*international academic quality*). Namun persaingan pendidikan tinggi di era pasar bebas menuntut standar mutu pendidikan yang lebih baik, yang dapat masuk ke segmen manapun di tanah air karena standar kesepakatan global yang memungkinkan hal tersebut terjadi, termasuk untuk negara berkembang seperti Indonesia. Pengelolaan sistem pendidikan yang lebih baik akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan sumber daya manusia yang akan dihasilkan oleh PTAIS di masa mendatang, serta membantu memposisikan Indonesia dalam berbagai tingkat persaingan, baik regional maupun internasional, menjadi lebih baik.

Tentu saja kebijakan peningkatan pengelolaan sistem pendidikan tinggi harus tetap mempertimbangkan potensi daerah dimana PTAI berada.

Paradigma *think locally act globally*, PTAIS di Indonesia diharapkan mampu mengakomodir perkembangan seluruh potensi yang ada, baik daerah, nasional maupun internasional dengan selalu berpijak pada *Islamic values morality* sebagai basis aplikasi pendidikan tingginya. Upaya penguatan manajemen mutu sistem Pendidikan Tinggi Agama Islam Swasta di Indonesia perlu didukung oleh beberapa hal yaitu;

1. Implementasi penjaminan mutu dan akreditasi dengan skala regional dan internasional. Kebijakan ini perlu dilakukan jika PTAIS di Indonesia benar-benar ingin bertahan dalam arena kompetisi di era globalisasi. Kebijakan itu harus diiringi dengan *spirit of competitiveness* dengan menyiapkan SDM dan infrastruktur PTAIS yang lebih baik. Upaya itu dapat dilakukan misalnya melalui kerjasama dengan badan jaringan perguruan tinggi regional seperti *Southeast Asia Ministry of Education Organization (SEMEO)* untuk mendorong realisasi akreditasi tingkat regional. Setelah upaya akreditasi regional dapat berjalan dengan baik, transisi ke arah akreditasi internasional sebagai prasyarat untuk memperlebar akses ke masyarakat internasional tidak akan sulit.
2. Otonomi pengelolaan pendidikan tinggi yang lebih matang dengan tetap memberdayakan potensi daerah. Hal ini dimaksudkan agar PTAIS di daerah mampu secara lebih leluasa mengelola lembaga pendidikan tingginya sesuai dengan potensi daerah serta peluang penyesuaian potensi yang ada dengan potensi internasional yang dapat dikembangkan melalui *international academic networking*, sehingga akan lebih mampu menyokong kiprah PTAIS yang ada untuk bekerja dan menyiapkan segala sesuatunya secara lebih optimal. Hal ini diasumsikan karena PTAIS di Indonesia secara keseluruhan memiliki karakteristik yang berbeda, baik negeri maupun swasta dan memiliki potensi daerah yang berbeda pula, serta problematika sekaligus *problem solving* yang tentunya sangat bervariasi. Oleh karena itu kebijakan otonomi kampus menjadi prasyarat yang mutlak harus dilakukan, yang tentunya tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dengan selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
3. Akuntabilitas aplikasi Pendidikan Tinggi Islam Swasta yang didukung oleh seluruh *stakeholder*. Akuntabilitas menjadi salah satu kunci sukses aplikasi pendidikan tinggi karena di dalamnya adanya jaminan akan keterbukaan dalam pengelolaan perguruan tinggi. Dengan adanya akuntabilitas, pendidikan tinggi Islam akan mampu mengikuti

percepatan perkembangan dunia pendidikan. Ada *positive feedback* dari seluruh *stakeholder* untuk bersama sama memajukan PTAI di mana mereka saling berkepentingan. (Jalal dan Supriadi, 2001).

4. Kompetensi sumber daya infrastruktur dan SDM PTAIS semakin ditingkatkan melalui kebijakan *resources improving* yang berkelanjutan. Kebijakan ini perlu dilakukan melalui berbagai upaya, baik internal maupun eksternal. Manakala PTAIS yang bersangkutan tidak memiliki sumber dana yang cukup untuk program itu, dapat disiasati dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang konsen terhadap pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan, baik swasta maupun negeri yang tentunya berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kebijakan itu perlu dikedepankan karena eksistensi sebuah organisasi di masa depan tidak hanya ditentukan oleh internal sivitasnya saja, tetapi oleh faktor eksternalnya juga (Mc Rae, 1995).

Penerapan manajemen mutu harus didukung dengan suasana akademik yang baik agar upaya peningkatan mutu akademik dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Suasana akademik yang baik akan lahir bila didukung oleh kesadaran holistik seluruh civitas akademika tentang tingkat urgensi mutu pendidikan tinggi Islam. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan budaya akademik yang lebih sehat dan kondusif dengan mengajak seluruh sivitas akademika yang ada untuk bersama-sama meningkatkan proses pembelajaran dan pendidikan yang lebih baik berdasarkan komitmen terhadap mutu yang diinginkan dan diharapkan oleh seluruh sivitas yang ada.

Dalam rangka internasionalisasi pendidikan tinggi Islam yang lebih humanis dan jejaring akademik internasional yang luas untuk mendukung sumber daya manusia dalam negeri menjadi unggul, inovatif, dan produktif, merupakan suatu keniscayaan agar PTAIS kedepannya dapat mengurangi pengangguran sekaligus menciptakan lulusan yang berdaya saing. (output) dalam berbagai skala persaingan. Pemahaman kemanusiaan dan keragaman di kalangan akademisi diperlukan agar pendidikan tinggi tidak hanya berorientasi pada materialisme yang didominasi oleh kelas atas tetapi juga memiliki kepekaan terhadap pentingnya mengembangkan potensi sumber daya manusia masa depan bahkan dari struktur ekonomi yang kurang mampu. Artinya, terbuka kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang baik bagi putra-putri negeri tercinta ini sebagai wujud pemimpin masa depan.

Dengan dukungan perangkat manajemen mutu sistem pendidikan tinggi Islam yang lebih baik serta strategi pengembangan pendidikan tinggi yang matang dan tepat, PTAIS di Indonesia akan memiliki prospek yang baik untuk bersaing tidak hanya di tingkat nasional dan daerah tetapi juga di tingkat internasional. Selain itu, setidaknya PTAIS di Indonesia akan

mendapatkan beberapa keuntungan akademik, seperti; semakin kuat kiprah dan eksistensi PTAIS di tengah persaingan global, semakin luas jejaring internasional yang dimilikinya sebagai landasan pengembangan akademik dan sosial PTAIS kepada masyarakat dan civitas akademiknya, serta semakin meningkat kualitas produk pendidikan tinggi yang diharapkan dapat tidak hanya berdaya saing dan produktif dalam berbagai tingkat persaingan, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan budaya masyarakat sehingga kedepannya diharapkan mampu mendukung kemajuan bangsa dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan kata lain, PTAIS di Indonesia dapat menghasilkan keluaran untuk melestarikan identitas nasional, mempertahankan dan mengembangkan basis intelektual dan budaya masyarakat, memberikan inspirasi dan kebanggaan bagi warga negara, dan mendorong dialog untuk menghormati keragaman budaya dan sosial.

Upaya pengembangan dan peningkatan manajemen mutu sistem pendidikan tinggi islam bagi ptais di indonesia dengan pendekatan *triple quality* yang dikembangkan oleh juran, yang terkenal dengan konsep *juran's trilogy*, (sallis, 2001: 67-68) yang mencakup 3 komponen utama, yaitu;

1. *Quality planning* (perencanaan mutu). Perencanaan mutu merupakan tahapan untuk menentukan dan merancang segala perangkat pendidikan tinggi, baik infrastruktur maupun lainnya seperti misi, visi, program, kebijakan, serta sketsa tahapan proses yang akan dilalui untuk dirancang secara lebih matang dan komprehensif agar mampu menghasilkan pendidikan tinggi islam yang lebih kompetitif dan produktif berdasarkan nilai-nilai keislaman sebagai landasan aplikasinya. Aspek *quality planning* menjadi penting dilakukan karena perkembangan ptais pada dasarnya juga menyesuaikan diri dari perkembangan masyarakat termasuk masyarakat global. Dengan kata lain, kebijakan yang dirancang adalah manifestasi dari kebutuhan dan keinginan masyarakat (*social need and desire*);
2. *Quality control* (pengendalian mutu). Tahapan ini juga penting karena pengendalian mutu pada dasarnya merupakan jaminan mutu yang ingin dihasilkan. Dengan adanya *quality control*, ptais dapat memastikan proses implementasi manajemen pendidikan tingginya dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan semula, baik menyangkut program pendidikan yang dijalankan, kurikulum, perangkat infrastruktur pendidikan tinggi, sdm, *out put* yang dirancang, maupun tingkat akselerasinya terhadap kompetisi dunia pendidikan tinggi dan dunia kerja agar tetap eksis dan *survive*.

3. *Quality improvement* (peningkatan mutu). Tahapan ini merupakan upaya tindak lanjut dari proses pelaksanaan mutu di mana seluruh rencana akademis ptais yang telah dilaksanakan dievaluasi untuk kemudian dilakukan pembenahan secara simultan dan komprehensif guna memperbaiki kelemahan yang terjadi sebelumnya. Dengan peningkatan mutu berkelanjutan, eksistensi PTAIS di Indonesia akan lebih *appreciable* terhadap kebutuhan dan perkembangan masyarakat global. Hal ini juga dapat diartikan bahwa pengelolaan program pendidikan tinggi islam dalam konteks internasionalisasi pendidikan sudah saatnya memperhitungkan standar mutu sebagai basis peningkatan akselerasi *equality access* untuk bersaing berbagai tingkat kompetisi.

D. KESIMPULAN

Perguruan tinggi merupakan wadah bagi insan terpelajar untuk bekerjasama mencapai tujuan pendidikan. UU Sistem Pendidikan Nasional menekankan pentingnya menciptakan suasana dan proses belajar bagi peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan empat kebijakan utama di bidang pendidikan, antara lain kesetaraan dan kesempatan, relevansi dengan pembangunan, mutu, dan efisiensi. Lembaga penjaminan mutu di universitas memainkan peran penting dalam memastikan pendidikan berkualitas internasional. Upaya pengembangan dan peningkatan manajemen mutu pendidikan tinggi Islam di Indonesia didasarkan pada pendekatan *triple quality* yang dikembangkan oleh Juran. Pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya serta membentuk karakter dan peradaban bangsa. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan warga negara yang cerdas, sehat, berpengetahuan, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunyamin, B., & Alamsyah, A. (2016). Manajemen Mutu Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta. *Jurnal Pendidikan Islam*, 28(2), 203. <https://doi.org/10.15575/jpi.v28i2.544>
- Furchan, A. (2004). *Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Hengki, P., & Kadek. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Penjaminan Mutu*. <https://doi.org/10.25078/JPM.V1i2.45>
- Iskandar, J. (2017). Penerapan Manajemen Strategi Dalam Peningkatan Mutu Madrasah. *Idarah*, 1(2).
- Kurniawan. (2012). Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Bagi Perguruan Tinggi Swasta (Studi Kasus Universitas Bina Darma). *Seminar Nasional Informatika 2012*.
- Mas'ud, A. dkk. (2001). *Paradigma Pendidikan Islam*. Semarang: Pustaka Pelajar dan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.
- Rivan, A. (2005). *Strategi dan Prospek Pengembangan Mutu Lulusan PTAI di Indonesia. Kedaulatan Rakyat*. Yogyakarta.
- Sudarsana, I. K. (2017). Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah Dalam Upayapembangunan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Penjaminan Mutu*. <https://doi.org/10.25078/jpm.v1i1.34>
- Sufyarma. (2004). *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto. (2001). *Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah: strategi Pendidikan Nasional dalam era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Uhamka Ekspres.
- Ulfah Iran, Murniati, & Khairuddin. (2014). Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Sman. *Administrasi Pendidikan*, 4(2).
- Yudi, A. A. (2012). Pengembangan Mutu Pendidikan Ditinjau Dari Segi Sarana Dan Prasarana (Sarana Dan Prasarana Pplp). *Cerdas Sifa*, (1).

